

ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KORESPONDSI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Sophia Rahmi¹, Said Bambang Nurcahya²

Administrasi Perkantoran dan Bisnis Digital, Politeknik Pajajaran ICB Bandung Indonesia 40192
sophiarahmi@gmail.com¹, said.bambangnurcahya@poljan.ac.id²

Abstract

Local Government Revenue is one of the instruments of the regional government that comes from tax collections on the economic potential in its working area. In carrying out activities, the Regional Government requires other Regional Revenues derived from regional original income or from transfers between regions and transfers from the center. The West Bandung Regency Government has economic potential from the services, finance, trade, mining, industry, agriculture, plantation and agricultural sectors. fisheries so that income from this tax sector must be worked out efficiently and accurately so that the community in this case taxpayers find it easy to get tax services so that in the long term the increase in income increases, the impact of the Covid 19 pandemic on the economy in West Bandung Regency is felt, the service sector tourism is one of the most affected so that the Regional Revenue Agency of West Bandung Regency made a breakthrough to implement correspondence using a correspondence management information system to increase regional income. The application analysis used in this study uses a SWOT analysis with a descriptive methodology by displaying comparative statistics on revenue realization in 2020 and 2021. In the application of this application, of course, there are still many obstacles that must be corrected related to digital tax correspondence.

Keywords: *Correspondence Management Information System, Original local Government Revenue, Regional Revenue Increase, BAPENDA West Bandung Regency.*

Abstrak

Pendapatan daerah adalah salah satu instrumen dari Pemerintah Daerah yang berasal dari pungutan pajak atas potensi ekonomi yang berada di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan kegiatan, Pemerintah Daerah membutuhkan Pendapatan Daerah baik yang berasal dari Pendapatan asli daerah atau dari transfer antar daerah dan transfer dari pusat. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mempunyai potensi ekonomi dari sektor jasa, keuangan, perdagangan, pertambangan, industri, pertanian, perkebunan, dan perikanan sehingga pendapatan dari sektor pajak ini harus digarap secara efisien dan akurat sehingga masyarakat dalam hal ini wajib pajak merasa mudah dalam mendapatkan pelayanan perpajakan sehingga jangka panjangnya peningkatan pendapatan menjadi meningkat, Pengaruh Pandemi Covid 19 terhadap perekonomian di Kabupaten Bandung Barat sangat terasa, sektor jasa pariwisata menjadi salah satu yang terdampak besar sehingga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat melakukan terobosan untuk menerapkan korespondensi menggunakan sistem informasi manajemen korespondensi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Analisis penerapan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan SWOT analisis dengan metodologi deskriptif dengan menampilkan statistik perbandingan realisasi pendapatan tahun 2020 dengan 2021. Dalam penerapan Aplikasi ini tentunya masih banyak kendala yang harus diperbaiki berkaitan dengan digital korespondensi perpajakan.

Kata Kunci : **Sistem Informasi Manajemen Korespondensi, Pendapatan Asli Daerah, Peningkatan Pendapatan Daerah, BAPENDA Kabupaten Bandung Barat.**

Corresponding Author : said.bambangnurcahya@poljan.ac.id

PENDAHULUAN

Kabupaten Bandung Barat sebagai kota penyangga Ibu Kota Provinsi Jawa Barat dengan panorama alam yang elok nan cantik menjadikan wilayah alam eksotik yang mampu menarik bukan saja warga Jawa Barat, tetapi warga Ibukota Negara Indonesia yaitu Jakarta untuk berlibur dan mengunjungi Kabupaten Bandung Barat. Kecamatan Lembang adalah salah satu daerah wisata dengan berbagai atraksi yang menggabungkan alam, arsitektur, seni tradisional, dan modern sehingga mampu menarik masyarakat seluruh Indonesia menikmati makanan, jajanan, handicraft dan oleh-oleh khas daerah. Tentu kegiatan ini menjadikan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung Barat berkembang dan mampu dijadikan tumpuan pendapatan asli daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam mengejar target pendapatan dituntut untuk kreatif, aktif, cepat, dan akurat dalam merealisasikan target tersebut maka salah satu kebijakannya adalah menerapkan korespondensi menggunakan media digital, Sistem Informasi Manajemen Korespondensi ini diharapkan dapat menjawab tantangan target peningkatan pendapatan secara cepat, akurat, dan efisien sehingga capaian target meningkat secara signifikan,

Sistem Informasi Manajemen Korespondensi yang diterapkan di Kabupaten Bandung Barat selama ini masih perlu dilakukan analisis, sehingga strategi dalam meningkatkan pendapatan daerah dapat dilakukan sesuai dengan kondisi dan potensi daerah. Pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Bandung Barat meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak reklame, pajak air, pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak hiburan, pajak penerangan dan pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Agar semua potensi pajak ini terealisasi maka

unsur penting dalam berinteraksi dengan wajib pajak adalah korespondensi secara digital.

Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan sistem informasi manajemen korespondensi ini berdampak kepada peningkatan pendapatan daerah.

Adapun Tujuan dari penelitian ini agar Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat melakukan peningkatan layanan dan informasi berkaitan dengan korespondensi perpajakan sehingga wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela dan terbuka dalam melaporkan dan memyeter kewajiban pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Analisis SWOT, Tujuan, Cara Membuat.

SWOT adalah kepanjangan dari Strength, Weakness, Opportunities, Threats. Analisis SWOT adalah teknik perencanaan strategi untuk bisnis atau suatu proyek. Metode ini mempertimbangkan faktor internal dan eksternal guna menyusun strategi bisnis yang efektif. Albert S Humphrey adalah yang pertama kali memperkenalkan teknik ini di tahun 1960-an ketika menginisiasi proyek penelitian di Stanford Research Institute. Sejak saat itu, akhirnya SWOT mulai digunakan oleh para pebisnis untuk menumbuhkan dan mengembangkan perusahaan mereka. analisis SWOT adalah :

Dalam membangun sebuah bisnis, cukup penting bagi Anda untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan analisis SWOT. Secara umum, pengertian analisis SWOT adalah metode perencanaan dengan mengevaluasi 4 komponen, yaitu:

S – Strengths

Komponen SWOT yang pertama adalah strengths atau kekuatan dalam bisnis.

W – Weakness

Sophia Rahmi¹, Said Bambang Nurcahya²

Dalam analisis SWOT, W adalah weakness yang artinya kelemahan perusahaan atau bisnis.

O – Opportunities

Komponen SWOT berikutnya adalah opportunities yang berarti peluang bisnis.

T – Threats

Sedangkan, analisis SWOT yang berkaitan dengan ancaman usaha adalah threats.

Berdasarkan pengertian analisis SWOT tersebut, bisa dikatakan bahwa metode ini akan membantu para pemilik usaha dalam mengatur tingkat kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang dimiliki secara sistematis. Dengan begitu, seluruh pihak bersangkutan dengan bisnis bisa lebih mudah memahami dan mengenali proyek atau perusahaan. Kesimpulannya, tujuan analisis SWOT adalah membantu Anda merencanakan strategi bisnis berdasarkan faktor-faktor yang ada sehingga dapat mengambil keputusan tepat.

Manfaat analisis SWOT

Setelah mengetahui apa itu analisis SWOT, mari kita bahas mengenai manfaatnya. Well, ada begitu banyak manfaat analisis SWOT yang bisa didapatkan, terutama saat Anda ingin melakukan perencanaan bisnis. Pada dasarnya, empat komponen utama tersebut bisa berfungsi sebagai acuan dalam menjalankan strategi misi hingga mencapai tujuan (visi) bisnis. Dengan kata lain, manfaat analisis SWOT adalah untuk membantu Anda melakukan perencanaan prospek bisnis secara terstruktur dengan mengetahui hal-hal berikut ini. Bagaimana cara agar kekuatan (strengths) dapat menghasilkan keuntungan melalui peluang (opportunities), Bagaimana strategi mengatasi kelemahan (weaknesses) yang berisiko mencegah keuntungan, Bagaimana cara agar kekuatan (strengths) bisnis mampu menghadapi ancaman (threats) yang ada, Langkah yang harus dilakukan untuk

mengendalikan kelemahan (weaknesses) yang berisiko menimbulkan ancaman (threats), Dengan mengetahui SWOT proyek atau perusahaan seperti di atas, Anda bisa mempertimbangkan keputusan dan menentukan prioritas dengan lebih baik. Tak hanya itu, manfaat analisis SWOT adalah untuk membantu para pelaku UKM yang ingin memperoleh modal usaha dengan mengajukan proposal kepada investor. Analisis tersebut akan sangat berguna agar mereka bisa mengetahui secara jelas kondisi internal maupun eksternal bisnisnya.

Faktor analisis SWOT

Dalam analisis SWOT, Anda perlu mengetahui dua faktor utama yang juga dikenal sebagai Matrix IE/IE Matrix, yaitu internal dan eksternal. Kedua faktor ini akan membantu Anda dalam mengumpulkan data analisis yang ingin dibuat. Berikut ulasannya.

1. Faktor internal

Faktor internal dalam analisis SWOT adalah kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) yang diperoleh dari bagian internal perusahaan atau bisnis. Faktor ini umumnya berkaitan dengan sumber daya dan pengalaman yang ada, seperti:

Sumber daya fisik (fasilitas, lokasi, dan peralatan), Sumber daya manusia (karyawan, sukarelawan atau target pasar), Sumber daya keuangan (pendanaan, sumber pendapatan hingga peluang investasi), Akses ke sumber daya alam (merek dagang, paten, maupun hak cipta), Proses saat ini (program karyawan, hierarki departemen atau sistem perangkat lunak)

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal dalam analisis SWOT adalah peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang umumnya diperoleh dari pihak-pihak eksternal. Untuk mencari tahu faktor eksternal berikut, Anda dapat melakukan survey dengan menyebarkan kuesioner kepada para konsumen. Dengan memahami faktor eksternal ini, Anda bisa

mengetahui langkah-langkah apa saja yang diperlukan untuk menghadapi peluang serta ancaman. Perlu diketahui, faktor eksternal juga biasanya merupakan hal-hal diluar kendali, seperti:

Demografi

Tren ekonomi, mulai dari tren keuangan lokal, nasional, atau internasional, Tren pasar, seperti produk baru, kemajuan teknologi, dan pergeseran kebutuhan konsumen, Pendanaan, seperti donasi, legislatif dan juga sumber lainnya, Hubungan antara distributor dan mitra, Peraturan politik, lingkungan, maupun ekonomi.

Pengertian Korespondensi

Pada masalah persuratan, tentunya tidak asing mendengar kata korespondensi. Korespondensi diambil dari Bahasa Inggris yang *correspondence* berarti dengan yang lain, dan *respondere* berarti menjawab. Kata korespondensi memiliki arti tersendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perihal surat menyurat yang memiliki hubungan. Hubungan atau kesamaan yang ada pada korespondensi ini dalam bentuk tertulis yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan perusahaan lain dalam bentuk kerjasama yang dilakukan. Kegiatan yang dilakukan pada pembuatan korespondensi dapat dilakukan oleh perseorangan atau oleh perusahaan. Korespondensi yang dilakukan sering disebut dengan kegiatan surat menyurat. Pihak yang terkait dalam proses surat menyurat disebut dengan koresponden.

Jenis-jenis surat korespondensi

Sama dengan jenis dari persuratan yang ada pada perusahaan, korespondensi memiliki dua jenis yaitu korespondensi eksternal dan korespondensi internal.

1. Korespondensi eksternal

Korespondensi eksternal adalah hubungan surat menyurat yang berhubungan dengan pihak luar dari perusahaan.

2. Korespondensi internal

Sedangkan korespondensi internal adalah hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh pegawai-pegawai yang ada di dalam kantor atau ruang lingkup internal dari perusahaan tersebut.

Fungsi surat korespondensi

Surat korespondensi memiliki fungsi masing-masing dalam pembuatannya, fungsi utamanya yaitu memiliki hubungan yang erat dengan pihak internal atau pihak eksternal dari perusahaan tersebut. Dengan adanya surat tersebut akan menjadikan hubungan kerjasama antara perusahaan satu dengan yang lainnya menjadi lebih jelas dan terarah. Unsur-unsur pembuatan surat korespondensi

1. Pengirim surat

ini menjadi unsur penting karena surat harus mengetahui siapa pengirimnya untuk memudahkan dalam mengidentifikasi asal surat tersebut.

2. Penerima surat

unsur kedua ini juga menjadi unsur pokok karena tidak mungkin surat dibuat tanpa mengetahui untuk siapa surat tersebut dibuat.

3. Isi pesan

unsur ini juga menjadi unsur pokok karena pesan tidak dapat disampaikan bila tidak memiliki isi pesan didalamnya. Penerima pesan juga tidak dapat mengetahui maksud dan tujuan dari pengiriman pesan tersebut.

4. Saluran

saluran yang dimaksud adalah media penyaluran atau penyampaian yang dijadikan sebagai proses pendistribusian dari surat tersebut. Korespondensi surat juga harus memiliki unsur-unsur pembuatan tersebut, agar surat yang dibuat dapat tersampaikan dengan baik dan maksimal. Pada korespondensi juga memiliki jenis korespondensi bisnis dimana jenis surat ini tidak dapat dipisahkan dari suatu bentuk kerjasama pada perusahaan. Korespondensi bisnis ini juga menyampaikan proses ekonomi yang terlibat di dalam suatu perusahaan tersebut. Dampak kemajuan teknologi pada proses persuratan, Adanya

Sophia Rahmi¹, Said Bambang Nurcahya²

bentuk kemajuan dewasa ini juga mengubah segala sesuatu yang dilakukan secara konvensional dan manual yang menggunakan cara sederhana berubah menjadi cara yang lebih modern dan memanfaatkan teknologi. Salah satu contohnya adalah mengubah cara pembuatan surat dengan sederhana dengan menggunakan cara modern. Penggunaan cara tersebut adalah dengan memanfaatkan teknologi, dimana teknologi tersebut dapat mengubah semua sistem yang lama ke sistem baru dan tentunya dengan cara lebih singkat. Penggunaan teknologi tersebut adalah pemanfaatan aplikasi atau alat pembantu surat menyurat dengan tetap memperhatikan dengan fungsi surat dan tujuan pembuatan surat. Selain menggunakan aplikasi atau alat surat menyurat, pada kemajuan teknologi saat ini perubahan sistem tersebut dapat berganti menjadi penggunaan alat seperti telepon, telegram, email atau faksimile. Namun akan lebih mudah dan efisien apabila proses persuratan yang ada menggunakan kecanggihan teknologi berupa bentuk surat menyurat.

Pemanfaatan dampak teknologi

Aplikasi persuratan ini akan membantu mengolah persuratan yang ada dengan tetap memperhatikan pengertian surat sebagai sebuah alat komunikasi, dan tetap memperhatikan fungsi, tujuan serta jenis-jenis dari surat itu sendiri. Pada sebuah aplikasi persuratan juga mampu melakukan sebuah aktivitas korespondensi yang dilakukan dengan mudah dan baik di dalam sebuah aplikasi tersebut. Oleh sebab itu penerapan aplikasi persuratan memiliki keunggulan dan kemudahan dalam melakukan aktivitas persuratan serta membantu pegawai administrasi untuk melakukan pekerjaan mereka. Oleh karena banyaknya manfaat yang didapat dari penggunaan aplikasi persuratan, maka perusahaan wajib menggunakan aplikasi

surat menyurat SIPAS yang menjadi solusi dari permasalahan persuratan yang ada. SIPAS adalah sebuah sistem informasi untuk melakukan pengarsipan surat dan proses surat menyurat yang termasuk mampu membuat korespondensi surat. Aplikasi ini mudah digunakan dan dipakai dan mampu diakses kapan saja dan dimana saja. Tentunya penggunaan yang ringan dan mampu menyesuaikan kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Informasi lebih lanjut mengenai SIPAS dapat diakses melalui laman berikut.

Fungsi Sistem Informasi Manajemen

Fungsi sistem informasi manajemen ini awalnya hanya sebagai transformasi data. Tapi, seiring perkembangan teknologi, fungsinya pun terus berkembang. Fungsi dari sistem informasi manajemen ini menjadi banyak sekali. Fungsi dari sistem ini tidak terbatas pada pihak manajemen saja, melainkan juga bagi bisnis secara keseluruhan. Berikut ini beberapa fungsi dari sistem informasi manajemen. Meningkatkan produktivitas serta penghematan dalam hal biaya di dalam organisasi Mempermudah pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan serta pendelegasian kinerja pada semua departemen yang berkoordinasi. Berperan penting dalam proses pengambilan keputusan di dalam bisnis. Karena dalam bisnis, keputusan dibuat berdasarkan informasi yang relevan dan informasi yang relevan hanya dapat diambil dari sistem informasi manajemen. Membantu dalam membangun hubungan yang sehat antara setiap orang dari departemen ke departemen melalui pertukaran informasi yang tepat. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengolahan data dengan sajian data secara akurat dan realtime. Untuk meminimalisir biaya dan meningkatkan produktivitas suatu perusahaan. Untuk memudahkan bagian manajemen melakukan perencanaan, pengawasan, dan pengarahan kerja bagi

semua departemen yang akan dikoordinasikan. Sebagai sarana untuk peningkatan SDM dengan ketersediaan unit kerja yang sistematis dan terkoordinasi berbasis teknologi. Meningkatkan efisiensi serta efektivitas data yang lebih realtime dan akurat. Membantu dalam membandingkan kinerja bisnis. Sistem ini menyimpan semua histori data dan informasi dalam basis data. Itu sebabnya sistem ini sangat berguna untuk membandingkan kinerja organisasi bisnis. Poin paling penting dalam sistem informasi manajemen adalah data yang akurat dan real time.

Tujuan Sistem Informasi Manajemen

Sistem informasi manajemen memang memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan dan perencanaan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau bidang usaha. Tujuannya antara lain:

Menyediakan informasi yang berguna dalam menganalisis data dan pengambilan keputusan bagi suatu perusahaan atau bisnis. Memudahkan pekerjaan dan pengelolaan manajemen dalam suatu perusahaan atau bisnis. Menyediakan informasi dalam perhitungan produk, harga pokok jasa, dan tujuan-tujuan lain yang menjadi target manajemen. Menyediakan layanan yang dapat digunakan sebagai media pengendali, perencana, evaluasi, dan sebagai sarana perbaikan yang berkelanjutan. Memecahkan berbagai masalah dalam bisnis yang meliputi layanan, biaya produk, serta strategi bisnis. Dari beberapa tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang manajer atau pemilik bisnis atau juga pimpinan sebuah perusahaan sangat membutuhkan sebuah media, dan perlu mempunyai akses menuju informasi akuntansi manajemen dan juga mengetahui bagaimana cara yang tepat untuk bisa menggunakannya. Informasi akuntansi manajemen tersebut dapat membantu mereka dalam mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan suatu masalah dan mengevaluasi kinerja yang sudah dilakukan.

Sistem informasi manajemen inilah yang bisa membantu mereka untuk mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan suatu masalah, dan mengevaluasi kinerja yang sudah dilakukan sebelumnya atau yang sedang berjalan. Dengan adanya sistem informasi manajemen ini, diharapkan sebuah perusahaan atau bidang bisnis dapat mengantisipasi dan memahami peluang ekonomis dalam menerapkan teknologi informasi baru. Sebuah bisnis atau perusahaan juga akan terbantu dalam menjamin kualitas dan keterampilan sumber daya manusia dalam memanfaatkannya. Selain itu, dengan adanya sistem ini, akses data yang telah disediakan secara akurat dan real time (tepat waktu), pemilik perusahaan atau bisnis dapat mengembangkan perencanaan yang lebih maksimal dan efektif dalam menganalisis pelaksanaan kebijakan program dan mengidentifikasi keperluan untuk mendukung sistem informasi yang telah ada. Sistem informasi manajemen ini menjadi sangat diperlukan dalam bisnis lantaran adanya kompleksitas tinggi dalam setiap organisasi bisnis.

Pengertian BPHTB Online 2022

BPHTB adalah objek pajak yang dikenakan lantaran ada perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Pindahan hak tersebut muncul akibat proses jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, serta pemekaran usaha atau hadiah. BPHTB dikenakan untuk semua transaksi properti yang dibeli dari perorangan maupun developer. Besarnya BPHTB adalah 5% dari nilai transaksi setelah dikurangi NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak). NJOPTKP sendiri berbeda besarnya di setiap daerah. Oleh karenanya, BPHTB erat kaitannya dengan

Sophia Rahmi¹, Said Bambang Nurcahya²

tarif pajak yang berlaku. Setidaknya ada sejumlah hal yang perlu Anda ketahui tentang BPHTB, yakni:

BPHTB Adalah

BPHTB Online

Cara Menghitung BPHTB

Tarif BPHTB

BPHTB Waris

BPHTB Adalah

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau disingkat BPHTB adalah salah satu jenis pajak yang harus dibayarkan saat membeli rumah maupun properti lainnya. Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000, pemberian Hak Pengelolaan merupakan objek pajak. Dikenakannya Hak Pengelolaan sebagai objek pajak adalah karena penerima Hak Pengelolaan memperoleh manfaat ekonomis dari tanah yang dikelolanya. Namun, mengingat pada umumnya Hak Pengelolaan diberikan kepada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lembaga pemerintah lainnya, dan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan. Jadi, pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena pemberian Hak Pengelolaan perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah. Subjek pajak yang wajib dikenakan BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Sesuai aturan, tarif pajak yang ditetapkan sebesar 5%.

BPHTB Online

Besarnya BPHTB adalah 5% dari nilai transaksi setelah dikurangi NJOPTKP (nilai jual objek pajak tidak kena pajak).

BPHTB Waris

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000, disebutkan bahwa perolehan hak karena waris dan hibah wasiat merupakan objek pajak. Perolehan hak karena waris adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh ahli waris dari pewaris, yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Saat pewaris meninggal dunia, pada hakikatnya telah terjadi pemindahan hak dari pewaris kepada ahli waris. Saat terjadinya peristiwa hukum yang mengakibatkan pemindahan hak tersebut merupakan saat perolehan hak karena waris menjadi objek pajak. Mengingat ahli waris memperoleh hak secara cuma-cuma, maka wajar apabila perolehan hak karena waris tersebut termasuk objek pajak yang dikenakan pajak. Perolehan hak karena hibah wasiat adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan dari pemberi hibah wasiat, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia. Pada umumnya, penerima hibah wasiat adalah orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga dengan pemberi hibah wasiat, atau orang pribadi yang tidak mampu. Di samping orang pribadi, penerima hibah wasiat juga berupa badan yang biasanya mempunyai kegiatan pelayanan kepentingan umum di bidang sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan, yang semata-mata tidak mencari keuntungan.

PBB Online 2022 Cara mengurus dan mendaftar

Mengurus PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)? Sebelum membayarnya, Anda memerlukan SPPT SPPT adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Agar bisa membayar pajak tanpa beban, mari kenali dulu informasi lengkap seputar SPPT yang akan dibahas lebih dalam dengan poin-poin sebagai berikut:

Pengertian SPPT

SPPT adalah bentuk surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait pajak yang terutang selama satu tahun pajak. SPPT ini sudah diatur dalam UU No. 12 Tahun 1994 yang secara khusus mengatur Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan UU tersebut, SPPT adalah dokumen yang menunjukkan besarnya utang atas PBB yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak pada waktu yang telah ditentukan.

Pada umumnya, SPPT didapatkan sekaligus dengan Izin Memberikan Bangunan (IMB) dan juga sertifikat. Namun, perlu diingat bahwa SPPT tidak termasuk atau dikategorikan sebagai bukti kepemilikan objek pajak. SPPT adalah penentu atas objek pajak tersebut dan patokan jumlah pajak yang dibebankan terhadap objek pajak yang harus dibayarkan oleh pemilik. Oleh karena itu, terkadang ada perbedaan nama antara nama yang tercantum di sertifikat kepemilikan rumah dengan nama yang tercantum di SPPT PBB. Hal ini bisa saja terjadi karena pemilik awal tidak melakukan peralihan atau balik nama sertifikat atas tanah dan bangunan tersebut. Terkait dengan SPPT, sebagai Wajib Pajak, Anda berhak untuk mendapatkan SPPT PBB di setiap tahun pajak. Kemudian, jika ada yang tidak Anda mengerti, maka Anda pun boleh meminta penjelasan selengkapnya terkait ketentuan PBB. Selain itu, Anda juga memiliki kewenangan untuk mengajukan pengurangan atas pajak yang dibebankan kepada Anda.

Fungsi SPPT PBB

Memegang fungsi penting bagi Wajib Pajak ketika dalam proses pengumpulan dokumen lengkap untuk menjaga atau melindungi aset berharga. Menjadi salah satu elemen penting guna menghindari perebutan hak milik tanah dan bangunan atau terjadinya penipuan. Merupakan surat yang menunjukkan besaran beban pajak yang dibayarkan kepada negara oleh pemiliknya

terhadap objek pajak. Terlebih lagi bagi Anda yang merupakan pemilik usaha, SPPT PBB ini diperlukan oleh pihak bank sebagai bukti pendukung terkait pembuatan laporan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dalam kasus di mana terjadi tunggakan pada kredit yang diberikan kepada nasabah. Harapannya adalah nilai jaminan yang tertulis dalam Nilai Jual Objek Pajak atau NJOP bisa menjadi pengurang saat pembentukan PPAP yang dilakukan oleh bank.

Hak Wajib Pajak

Berikut hak yang diperoleh wajib pajak: Menerima SPPT PBB untuk setiap tahun pajak. Mendapatkan penjelasan berkaitan dengan ketentuan PBB dalam hal Wajib Pajak meminta. Mengajukan keberatan dan/atau pengurangan. Mendapatkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB dari Bank/Kantor Pos dan Giro Tempat Pembayaran PBB yang tercantum pada SPPT, atau Mendapatkan Resi/struk ATM/bukti pembayaran PBB lainnya (sebagai bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah sebagai pengganti STTS) dalam hal pembayaran PBB dilakukan melalui fasilitas ATM/fasilitas perbankan elektronik lainnya, atau Mendapatkan Tanda Terima Sementara (TTS) dari petugas pemungut PBB Kelurahan/Desa yang ditunjuk resmi dalam hal pembayaran PBB dilakukan melalui petugas pemungut PBB.

Kewajiban Wajib Pajak

Berikut kewajiban yang harus dilakukan wajib pajak:

Mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dengan jelas, benar dan lengkap, dan menyampaikan ke KPP Pratama/KP2KP setempat, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak. Menandatangani bukti tanda terima SPPT dan mengirimkannya kembali kepada Lurah/Kepala Desa/Dinas Pendapatan Daerah/KP2KP untuk diteruskan ke KPP Pratama yang menerbitkan SPPT.

Sophia Rahmi¹, Said Bambang Nurcahya²

Objek Pajak Kena PBB

Merupakan permukaan bumi atau tanah dan isinya. Mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 JO Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Merupakan konstruksi yang berada tertanam atau dilekatkan tetap pada tanah atau perairan sebagai hunian, area usaha maupun tempat yang diusahakan. Mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 JO Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Pendapatan Kabupaten Bandung Barat tahun 2022 mengemban tugas target pendapatan asli daerah yang wajib direalisasikan guna pembangunan daerah dan operasional kegiatan pendanaan seluruh organisasi pemerintah daerah, adapun gambaran target penerimaan pendapatan tahun 2020 dan tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Realisasi Pendapatan Daerah (ribu Rupiah)

No	Uraian	2020	2021
1	PENDAPATAN DAERAH	2.530.168.878.201,68	2.804.253.404.555,00
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	464.817.974.826,68	540.783.936.035,00
3	Pajak Daerah	330.898.929.358,00	375.265.784.971,00
4	Retribusi Daerah	27.510.250.500,00	17.073.496.576,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	494.842.021,00	653.894.651,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	105.913.952.947,68	147.790.759.837,00
7	PENDAPATAN TRANSFER	1.870.003.233.375,00	2.074.746.679.520,00
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.447.321.912.126,00	1.804.538.931.386,00
9	Pendapatan Transfer Antar Daerah	422.681.321.249,00	270.207.748.134,00
10	PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	195.347.670.000,00	188.722.789.000,00
11	Pendapatan Hibah	195.347.670.000,00	-
12	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	188.722.789.000,00
13	BELANJA DAERAH	2.639.640.727.270,93	2.917.749.150.862,06
14	BELANJA OPERASI	1.934.668.372.008,93	2.128.381.840.566,56
15	Belanja Pegawai	1.153.720.854.748,00	1.140.660.223.059,00
16	Belanja Barang dan Jasa	665.332.491.206,93	918.292.891.346,56
17	Belanja Bunga	2.855.004.000,00	723.711.188,00
18	Belanja Hibah	110.656.193.554,00	65.485.210.973,00
19	Belanja Bantuan Sosial	2.103.828.500,00	3.219.804.000,00
20	BELANJA MODAL	465.456.844.575,00	346.128.576.026,50
21	Belanja Modal Tanah	7.133.690.500,00	11.193.228.000,00
22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	190.396.585.609,00	134.040.385.765,00
23	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	113.378.948.383,00	71.983.011.083,50
24	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Ligasi	82.998.056.756,00	101.033.415.866,00
25	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	66.000.836.058,00	27.700.975.312,00
26	Belanja Modal Aset Lainnya	5.548.727.269,00	177.560.000,00
27	BELANJA TIDAK TERDUGA	74.183.964.539,00	8.328.012.910,00
28	Belanja Tidak Terduga	74.183.964.539,00	8.328.012.910,00
29	BELANJA TRANSFER	165.331.546.148,00	434.910.721.359,00
30	Belanja Bagi Hasil	38.518.706.534,00	40.579.431.776,00
31	Belanja Bantuan Keuangan	126.812.839.614,00	394.331.289.583,00
32	SURPLUS/(DEFISIT)	(109.471.849.069,25)	(113.495.746.307,06)
33	PEMBIAYAAN DAERAH	233.911.743.507,25	198.288.982.078,00
34	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	233.911.743.507,25	198.288.982.078,00
35	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	233.911.743.507,25	124.439.894.438,00
36	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	73.849.087.640,00
37	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-
38	PEMBIAYAAN NETTO	233.911.743.507,25	198.288.982.078,00
39	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN	124.439.894.438,00	84.793.235.770,94

Data : BPS 2022, Pendapatan dan Belanja Daerah

Apabila di bandingkan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2020 dan 2021 terjadi kenaikan realisasi sebesar 76 Milyar, kenaikan ini ditopang oleh kenaikan pajak daerah sebesar 45 Milyar dan PAD lain yang sah sebesar 42 Milyar, namun terjadi penurunan realisasi pada retribusi daerah sebesar 10 Milyar. Untuk mengantisipasi penurunan realisasi pendapatan daerah 2022, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat di bebani peningkatan target penerimaan pajak, sehingga salah satu kegiatannya adalah dengan menerapkan korespondensi aktif menggunakan teknologi informasi, berkaitan dengan penelitian ini, Penerapan Sistem Informasi Manajemen

Korespondensi yang di analisis menggunakan SWOT analisis adalah peningkatan pendapatan asli daerah 2021 yang dibandingkan dengan tahun 2020 sehingga kebijakan tahun berjalan 2022 dapat direncanakan, di monitoring, dan dievaluasi pelaksanaannya. Adapun pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung Barat terbagi menjadi Pajak Daerah, Retribusi daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan daerah, dan PAD lain-lain yang sah.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat, berupaya meningkatkan pendapatan daerah dengan melaksanakan penerapan Sistem Informasi Manajemen Korespondensi, dengan halaman muka aplikasi tersaji dalam gambar 1.

Gambar 1 Halaman Muka



Sumber : www.bapenda.bandungbaratkab.go.id

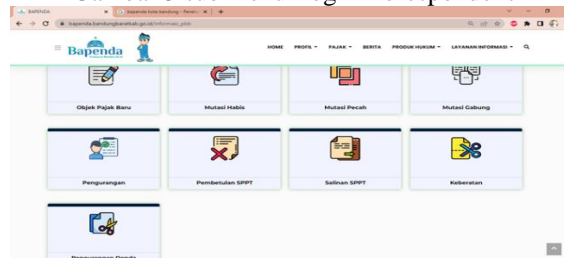
Super Admin, yaitu pengembang aplikasi, *Admin* adalah PNS yang diangkat oleh Kepala Badan sebagai penanggung jawab Aplikasi, *Supervisor* adalah kepala bagian perpajakan. *User* adalah staff Bapenda yang bertugas sehari-hari dalam operasional sistem. Tugas Pokok dan Fungsi dari staff Operasional Sistem Informasi Manajemen Korespondensi adalah bertanggung jawab operasional sehari-hari dalam korespondensi terhadap :

1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPTD)
2. Surat Pernyataan Objek Pajak (SPOP).
3. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
4. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

5. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
6. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)
7. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).
9. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Daerah (SKPDLB).
10. Surat Keputusan Pemungut Pajak Daerah (STPD).
11. Surat Peringatan,
12. Surat Paksa,
13. Surat Keputusan Pembetulan.
14. Surat Keputusan Keberatan.

Adapun untuk masuk lebih terperinci pada halaman Sistem Informasi Manajemen Korespondensi wajib memasukan nama pemakai (*User*) dan kata sandi (*Password*) sehingga tampilan halaman setelah masuk aplikasi terlihat pada gambar 4.

Gambar 3 sub menu Login Korespondensi



Sumber : www.bapenda.bandungbaratkab.go.id

Secara umum kegiatan korespondensi ini digunakan untuk kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga target peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Bandung Barat 2022 dapat terealisasi dan meningkatkan pembangunan. Mengacu kepada tabel 2

Tabel 2 Realisasi Pendapatan Daerah

Sophia Rahmi¹, Said Bambang Nurcahya²

No	Uraian	Ref	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN DAERAH	5.1.2.1	2.994.788.385.174,00	2.804.253.404.555,00	93,64	2.530.168.878.201,68
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.2.1.1	502.285.224.074,00	540.783.936.035,00	92,87	464.817.974.826,68
3	Pajak Daerah	5.1.2.1.1.1	391.200.000.000,00	375.265.784.971,00	95,93	330.898.929.358,00
4	Retribusi Daerah	5.1.2.1.1.2	37.698.929.439,00	17.073.496.576,00	45,29	27.510.250.500,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.2.1.1.3	494.842.021,00	653.894.651,00	132,14	494.842.021,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.2.1.1.4	152.891.452.614,00	147.790.759.837,00	96,66	105.913.952.947,68
7	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.2.1.2	2.223.236.241.100,00	2.074.746.679.520,00	93,32	1.870.063.233.375,00
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.2.1.2.1	1.801.369.006.654,00	1.804.538.931.386,00	100,18	1.447.321.912.126,00
9	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.2.1.2.2	421.867.234.446,00	270.207.748.134,00	64,05	422.681.321.249,00
10	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.2.1.3	189.266.920.000,00	188.722.789.000,00	99,71	195.347.670.000,00
11	Pendapatan Hibah		-	-	-	195.347.670.000,00
12	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		189.266.920.000,00	188.722.789.000,00	99,71	-

Sumber: www.Bandungbaratkab.go.id

Adapun Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Korespondensi yang di gunakan adalah analisa SWOT dengan kombinasikan sebagai berikut :

Kekuatan (Strength)

Kekuatan Bapenda Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam meningkatkan Pendapatan Daerah 2022 adalah Kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan Perpajakan. Kekuatan Wajib Pajak dalam memberitahukan, menyetor, dan melaporkan bukti bayar tersaji dalam tabel 2 dimana realisasi pendapatan daerah dicapai 93,64 dari target dan terjadi kenaikan 274 Milyar dari tahun 2020, sehingga dapat dijadikan modal utama kekuatan di Kabupaten Bandung Barat.

Kelemahan (Weakness)

Potensi perpajakan di Kabupaten Bandung Barat sangat besar tetapi kelemahan pendapataan daerah selama ini terlalu bergantung kepada jasa pariwisata, hotel dan restoran. Sehingga meskipun Covid 19 telah mulai landai tetapi industri pariwisatanya masih recovery sehingga realisasi pemasukan belum bisa menyamai atau melampaui target penerimaan pendapatan daerah.

Peluang (Opportunity)

Peluang Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam menggali potensi perpajakan sangat lebar, apalagi banyak bermunculan usaha kecil dengan ekonomi kreatif dan potensi masyarakat yang mulai menggunakan marketplace, dan media sosial untuk bertransaksi bisnis dan pengiriman barang, peluang ini yang harus dimanfaatkan untuk target penerimaan tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Hambatan (Threats)

Hambatan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam peningkatan pendapatan daerah adalah pangkalan data (data base) pelaku usaha Ekonomi Kreatif dan pengusaha baru (Startup) belum seluruhnya digali potensi untuk PAD.

a. Strategy SO (Strength-Opportunity)

Kekuatan dalam meningkatkan Pendapatan Daerah di Bapenda Kabupaten Bandung Barat adalah kesadaran Wajib Pajak melaksanakan perpajakan berpeluang untuk mengembangkan potensi penerimaan pendapatan daerah melalui peningkatan wajib pajak baru (ekstensifikasi) terhadap pengusaha (Startup) yang bergerak dalam ekonomi kreatif yang menggunakan pasar digital (marketplace), media sosial, dan Teknologi informasi dalam mengembangkan bisnis digital.

b. Strategy ST (Strength-Threats)

Kekuatan dan hambatan yang disebabkan oleh faktor eksternal Pengusaha Ekonomi Kreatif yang menggunakan marketplace belum secara sadar melaksanakan perpajakan di Bapenda sehingga Pangkalan Data (Data base) ekonomi kreatif tidak maksimal menyumbang pendapatan daerah, ini bisa terlihat dari penurunan realisasi retribusi daerah 2021.

c. Strategy WO (Weakness-Opportunity)

Kelemahan Internal yaitu terlalu bergantung kepada jasa pariwisata, hotel dan restoran dapat ddikembangkan apabila potensi Peluang eksternal yaitu ekonomi

kreatif yang berusaha menggunakan Marketplace dan media sosial di Kabupaten Bandung Barat dapat menjadi wajib pajak baru.

d. Strategy WT (*Weakness-Threats*)

Pengabungan strategi kelemahan Internal dengan hambatan dari luar harus diantisipasi kehilangan potensi pengusaha ekonomi kreatif Kabupaten Bandung Barat dengan mengadakan Pendataan Wajib Pajak baru yaitu *startup* yang berusaha menggunakan marketplace dan media sosial dalam berusaha.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari Analisis penerapan sistem informasi manajemen korespondensi dalam meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan SWOT analisis adalah belum terdata secara detail pengusaha baru (*startup*) yang berbisnis menggunakan marketplace, dan media sosial yang di kaitkan dengan Reklame, Restoran, dan Hiburan.

Untuk reklame papan board atau videotron yang saat ini menurun wajib dibuat antisipasi dengan membuat peraturan perpajakan menggunakan reklame online, begitu juga banyak tempat hiburan yang menggunakan media sosial dan restoran online yang menggunakan marketplace, go food, grab food, lazada food, toko pedia food, bukalapak food, go resto, grab resto dan lainnya yang belum dibuat pangkalan data (*Data base*) sehingga belum bisa meningkatkan pendapatan daerah tahun 2022.

Pembenahan dan peningkatan sistem terutama kinerja aparatur pengelola pendapatan yang dijalankan harus terus ditingkatkan, Sosialisasi dan Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan daerah yang ditopang oleh pajak daerah, baik secara online maupun offline. Peningkatan kualitas aparatur di

Badan pendapatan daerah Kabupaten Bandung Barat dalam menjalankan aturan akan berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah, Penggunaan teknologi informasi baik mainstream website maupun media sosial yang fleksibel dan mudah dipahami.

Saran

Saran dalam meningkatkan pendapatan daerah di Bapenda Kabupaten Bandung Barat menggunakan sistem informasi manajemen korespondensi adalah menambah fitur-fitur yang bisa mendukung ekstensifikasi wajib pajak adapun strategi kebijakan peningkatan pendapatan adalah :

1. Hendaknya Bapenda Kabupaten Bandung Barat memanfaatkan Media Sosial dalam sosialisasi peraturan tentang pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak restoran.
2. Hendaknya dalam mengali potensi PAD (*Ekstensifikasi*)Pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Bandung Barat lebih menysasar kepada pelaku bisnis digital yang menggunakan marketplace, media sosial, dan Digital Marketing lainnya.
3. Melakukan sosialisasi secara digital maupun langsung kepada pengusaha yang bergerak dibidang bisnis online dalam kewajiban perpajakan.
4. Melakukan kegiatan Pendataan potensi Wajib Pajak Baru dibidang restoran digital, tempat hiburan digital dan reklame digital sehingga bisa dibuat menjadi kebijakan tahun mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Akidna Rahma, 2021.,*Penjelasan Lengkap Mengenai Sistem Informasi Manajemen. <https://majoo.id/solusi/detail/sisteminformasi-manajemen-berbasis-akrual>* (Akual). Edisi Pertama.Yogyakarta:Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN

Sophia Rahmi¹, Said Bambang Nurcahya²

- Darise, N. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit PT. Indeks: Jakarta
- Darmawan, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Erlina, O.S.R., Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Jakarta:
- Farell, G., Saputra, H. K., & Novid, I. (2018). *Rancang bangun sistem informasi pengarsipan surat menyurat (Studi kasus Fakultas Teknik UNP)*. Jurnal Teknologi Informasi Dan Pendidikan, 11(2), 55-62.
- Fauzi, I. (2018). *Sistem Informasi Pengelolaan Surat Masuk Dan Surat Keluar Berbasis Web* Pada Mts Manarul Huda
- Febriyanto, E., Rais, N., & Syafaah, F. (2019). *Penerapan Aplikasi Tawk To IduHelp! Sebagai Sarana Pelayanan Informasi di Perguruan Tinggi*. Technomedia Journal, 3(2), 246-259
- Fujianti, D., & Sachintania, A. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Bandung. Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis), 5(2), 561-572.
- Gabby, A. P. 2017. *Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Pada PT Deho Canning Company Bitung*.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Salemba 4:Jakarta.
- Handayani, I., Aini, Q., & Oktavyanti, Y. (2015). *Penggunaan RinfoCal Sebagai Aplikasi Pengingat (Reminder) Kegiatan Akademik Pada Perguruan Tinggi*. CCIT Journal, 9(1), 13-26.
- Hayat, A., Maesaroh, S., & Ardiana, M. (2019). *Perancangan Aplikasi Green Media Berbasis Smartphone Sebagai Sarana Media Education dan Entertainment Pada Perguruan Tinggi*. Technomedia Journal, 3(2), 157-170.
- Mardi. 2014. *Sistem Informasi Akuntansi*. Galia Indonesia. Bogor.
- Masykur, F., & Atmaja, I. M. P. (2015). *Sistem Administrasi Pengelolaan Arsip Surat Masuk Dan Surat Keluar Berbasis Web*. IJNS-Indonesian Journal on Networking and Security, 4(3).
- PT.Populix informaton,2021, *Pengertian Analisis SWOT, Tujuan, Cara Membuat, dan Contohnya*.<https://info.populix.co/articles/analisis-swot-adalah/>
- Puspitawati. 2019. *The Influece Of The Quality Accounting Information System To The Of Accounting Information – Evidence In Indonesia*. Majalah Ilmiah UNIKOM Vol. 17 No. (1): Hal. 4-12. <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jurnal-unikom/article/view/2228>, 07 Agustus 2019 (20:33).
- Rahardja, U., Harahap, E. P., & Suciani, A. (2017). *Media Viewboard Sebagai Klasifikasi Jumlah Surat Keputusan Online Pada Perguruan Tinggi*. Technomedia Journal, 2(1), 69-81.
- Rahayu, S., Syarah, S., & Wardani, D. H. (2017). *Optimalisasi kartu kendali pada sistem informasi pendapatan surat keluar*. SENSI Journal, 3(1), 105-115.

Rahman, B., Susetyo, B., & Primasari, D. (2019). *Analisis kinerja pelayanan surat menyurat berbasis web di PGRI Kabupaten Bogor*. IKRA-ITH INFORMATIKA: Jurnal Komputer dan Informatika, 3(1), 1-11.

Ranita, S. V. (2019). *Pengelolaan surat menyurat pada Pengadilan Negeri Medan*. Jurnal Ilman: Jurnal Ilmu Manajemen, 1(2)

Rano Kurniawan, Muhamad Zahrudin, Mira Shintia, 2019, *Perancangan Sistem Informasi Korespondensi Berbasis Website Pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang*. Technomedia Journal (TMJ) Vol.4 No.1 Edisi Agustus 2019

Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Adimata

Sawitri, A. E., & Irhandayaningsih, A. (2019). *Analisis penggunaan aplikasi tata surat dalam pengelolaan surat masuk dan surat keluar pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Ilmu Perpustakaan, 6(3), 411-420. Sinar Grafika

Siregar, B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah* Sugiyono. (2013). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Sunarto. (2005). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: Amus Yogyakarta dan CitraPustaka Yogyakarta.

Utomo, K. P., & Daryoto, D. (2018). *Analisis Sistem Proses Pengelolaan Surat Masuk Dan Keluar Di Pemerintah Kota Bekasi (Studi Kasus Pada Bagian Bina Ekonomi, Pembangunan Dan Bina Ketahanan Pangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi)*. Jurnal Administrasi dan Kesekretarian, 3(1), 10-19.

Waluyo. (2005). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Emp

Yuliana, K., Shofwan, A. F., & Nuryadin, K. S. (2016). *Rancang bangun aplikasi sistem informasi inventarisasi surat masuk dan surat keluar berbasis web*. SENSI Journal, 2(2), 154-162.